

KALENDER KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

NO	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
01	02	03	04
1	JANUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014)
		1 - 10	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir atau LRP-APBDes S-2 (pasal 70, ayat (2), Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes atau LPRP-APBDes, LKPRP-APBDes.(pasal 70, Permendagri 20/2018).
		1 - 31	MUSRENBANGDES menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
2	PEBRUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 28/29	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 28/29	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 28/29	Pelayanan publik
3	MARET	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 31	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LKPPDes (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014) dan Permendagri no 46/2016, ps1 3 dan 4.
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
4	APRIL	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 10	Pecairan DD termin 1 dan ADD termin 1
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Pelayanan publik
5	MEI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
6	JUNI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 30	Pembentukan Tim Penyusun RKPDes .(pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014).
		1 - 30	MUSDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014).
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Pelayanan publik
7	JULI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 31	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester awal atau LRP-APBDes S-1 (pasal 68, Permendagri 20/2018)
		1 - 31	MUSRENBANGDES menyusun bahan RKPDes tahun anggaran berikutnya, (pasal 30, ayat (2), huruf f, Permendagri 114-2014)
		1 - 31	Mulai Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (3), Permendagri 114-2014)
		1 - 31	Proses RPKDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1 - 31	Proses APBDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1 - 31	Menerima Pagu Indikatif Desa (PID) baik DD, ADD, BHP, dan BK dari Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 35, ayat (2), Permendagri 114-2014)
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
8	AGUSTUS	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 31	Lanjutan Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya dengan melengkapi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (pasal 42, ayat (1), Permendagri 114-2014)
		1 - 31	Lanjutan Proses RPKDes Perubahan
		1 - 31	Lanjutan Proses APBDes Perubahan
		1 - 31	Pecairan ADD termin II
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
9	SEPTEMBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 30	Penyelesaian penyusunan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (4), Permendagri 114-2014)
		1 - 30	Penyelesaian Proses RPKDes Perubahan
		1 - 30	Penyelesaian Proses APBDes Perubahan
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Pelayanan publik
10	OKTOBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 10	Pencairan DD termin II dan ADD termin III
		1 - 31	Penyusunan dan penyesepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 32 dan 33 Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
11	NOPEMBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 30	Evaluasi dan persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s.d. 38 Permendagri 20/2018)
		1 - 30	Pembekalan seluruh aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terkait dengan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya. (pasal 60 dan 61 Permendagri 114/2014)
		1 - 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 30	Pelayanan publik
12	DESEMBER	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 31	MUSDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114/2014).
		1 - 31	Penyelesaian penyusunan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 38 Permendagri 20/2018)
		1 - 31	Sosialisasi RKPDes dan APBDes untuk tahun berikutnya kepada masyarakat. (pasal 59 Permendagri 114/2014)
		1 - 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 - 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektor dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik



Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Kajian Desa Nusantara
Ketua Umum

H. NUR ROZUQI, S.Pd.